

# PERCEPATAN PENINGKATAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI DAERAH PEDESAAN

*The Acceleration of Rural Economics Through Agribusiness Based Cooperation  
Development In Rural Area*

Almasdi Syahza<sup>1</sup>

**Lembaga Penelitian Universitas Riau**

E-mail: [asyahza@yahoo.co.id](mailto:asyahza@yahoo.co.id)

website: <http://almasdi.unri.ac.id>

## Abstrak

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Berkaitan dengan itu pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah Riau difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil. Untuk memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan. Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk agribisnis. Supaya koperasi bisa berfungsi dengan baik, maka perlu dikembangkan faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha.

**Kata kunci:** Koperasi, agribisnis, ekonomi pedesaan

## PENDAHULUAN

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari data tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 8,40%, pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Kesenjangan di daerah ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Pada tahun 1996 sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat pedesaan Riau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2 % sementara sektor industri melaju sebesar 14 persen. Namun pada tahun 2002 sektor pertanian sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan sebesar 6,06 persen, sedangkan sektor industri 12,47 persen. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan sektor pertanian cukup baik yaitu sebesar 6,79. Tingginya

---

<sup>1</sup> Almasdi Syahza, Peneliti senior dan Pengamat Ekonomi Pedesaan Lembaga Penelitian Universitas Riau. Program Studi Pendidikan Ekonomi email: [asyahza@yahoo.co.id](mailto:asyahza@yahoo.co.id), website: <http://almasdi.unri.ac.id>

pertumbuhan sektor pertanian karena ditunjang oleh tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan sebagainya (Syahza A, 2007a).

Guna memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di pedesaan, Pemerintah Daerah Riau mencanangkan pembangunan melalui program pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan program K2I). Program K2I ini mengacu kepada Lima Pilar Utama pembangunan Daerah Riau sebelumnya, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil.

Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Riau harus mengacu kepada Program K2I. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Basri Y.Z, 2003).

Dari apa yang digambarkan di atas, maka untuk memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk kebijakan pengembangan koperasi di daerah Riau. Dari sisi lain Wijaya S (2002) mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesaan bisa tumbuh karena koperasi berakar kuat di pedesaan.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana percepatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis agribisnis di daerah pedesaan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rencana strategis pengembangan dunia usaha melalui koperasi berbasis agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah pedesaan. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku-pelaku bisnis dan pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyanderaan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian pengembangan koperasi ini terfokus kepada studi pengembangan lembaga ekonomi melalui koperasi di daerah pedesaan. Penelitian ini mempergunakan metode survei dengan penentuan lokasi secara bertahap dan sepenuhnya dilakukan di daerah/kecamatan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah daerah potensial untuk pengembangan koperasi dari segi; jenis usaha dan potensi sumberdaya manusia.

Kriteria pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 1) daerah yang terpilih sebagai sampel merupakan daerah yang potensial menghasilkan produk unggulan daerah untuk pengembangan koperasi; 2) sampel yang dipilih adalah masyarakat dan pengurus koperasi yang mempunyai kegiatan usaha. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka lokasi penelitian adalah Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis.

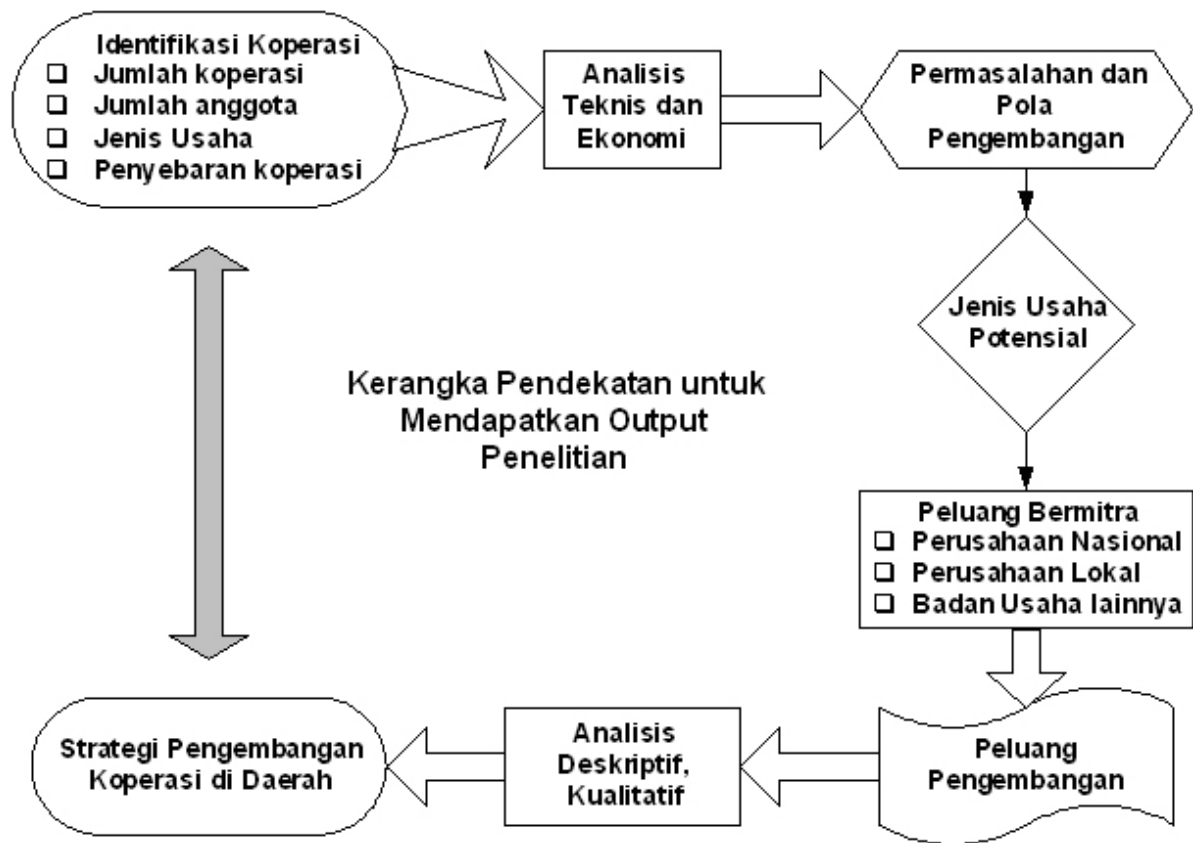
Pengambilan sampel dilakukan secara *Stratified Cluster Sampling* sehingga masing-masing daerah terpilih terdapat sampel yang mewakili. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa letak lokasi penelitian yang berpencaran, karakteristik koperasi sebagai objek penelitian yang beragam.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pelaku bisnis di daerah terutama dalam kegiatan koperasi, pemuka masyarakat, birokrasi di pedesaan. Data dari birokrasi pedesaan dan pemuka masyarakat berupa potensi sumberdaya yang ada, bentuk perekonomian masyarakat, komoditas unggulan dan penunjang di pedesaan, diversifikasi usahatani, dan pemilikan faktor produksi oleh pelaku bisnis di pedesaan. Di samping itu data primer juga dilengkapi dari lembaga tataniaga yang berhubungan secara langsung dengan ekonomi masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tinjauan pustaka, dan instansi yang terkait yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal. Dengan demikian dalam metode ini kuesioner tidak mutlak diperlukan. Kuesioner hanya berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan wawancara dengan responden dilakukan diskusi diantara peneliti, saling tukar informasi tentang suatu masalah tertentu. Perbedaan pandangan yang ditemui dalam suatu masalah yang disebabkan oleh adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga akan didapatkan persepsi yang sama diantara peneliti.

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan ditemukan strategi pengembangan koperasi untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah pedesaan di Propinsi Riau. Langkah-langkah untuk pemecahan masalah pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran dan Pemecahan Masalah

## HASIL dan PEMBAHASAN

### Profil Koperasi di Pedesaan

Berdasarkan informasi dan data yang ada pada Dinas Koperasi Propinsi Riau, rata-rata umur koperasi sekitar 10,2 tahun dengan rentangan 5,21 tahun sampai 16,4 tahun. Apabila dibandingkan dengan perusahaan bisnis lainnya, maka koperasi di Propinsi Riau cukup matang dalam perkembangannya dan tentu akan memperlihatkan dampak terhadap kesejahteraan anggotanya. Secara sinergi kemajuan koperasi itu seharusnya sudah memperlihatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan sebagian besar koperasi itu berada di daerah pedesaan, khususnya di daerah-daerah sentra produksi pertanian.

Pada Tabel.1 disajikan penyebaran koperasi di Propinsi Riau berdasarkan kabupaten/kota. Jumlah koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 4.176 unit. Dari semua itu hanya sebanyak 2.791 unit yang aktif atau sebanyak 66,83%, sisanya sebanyak 33,17% kopersai yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen koperasi di pedesaan sehingga koperasi tersebut tidak mampu memberikan pelayanan kepada anggota. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi terutama di daerah pedesaan. Faktor lain disebabkan koperasi belum mampu menjadikan dirinya sebagai badan usaha yang mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Seharusnya koperasi di pedesaan mampu sebagai badan usaha ekonomi masyarakat terutama sebagai penampung hasil produksi di pedesaan dan sebagai pemasar (pengecer) kebutuhan masyarakat pedesaan.

Apabila hal ini dapat dipenuhi oleh kopersai dan sistem menajemennya yang baik maka koperasi akan dibesarkan oleh mesyarakat itu sendiri (anggotanya).

Apabila dilihat dari jumlah anggota koperasi di Riau tercatat sebanyak 687.701 orang, artinya rata-rata masing-masing koperasi mempunyai anggota sebanyak 165 orang. Jumlah anggota ini apabila dibina akan dapat menghidupkan koperasi dengan baik di pedesaan. Ini merupakan potensi pasar yang cukup bagus terutama untuk komoditas barang harian (sembako) di pedesaan. Dari sisi lain produksi yang dihasilkan oleh masyarakat juga dipasarkan melalui koperasi. Tentu saja koperasi harus dipimpin oleh seorang manajer yang mengerti terhadap kebutuhan anggotanya.

Dari sisi modal koperasi memiliki Rp 380.017 juta (33,43%) dari total modal yang dimiliki. Namun dapat menghasilkan volume usaha sebanyak Rp 1.376.817 juta pada tahun 2007 dan menghasilkan sisa usaha sebesar Rp 111.582 juta.

Tabel 1. Rekapitulasi Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Tahun 2007

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi (Unit)			Modal Kerja (juta)		Volume Usaha (juta)	SHU (juta)
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Modal Sendiri	Modal Luar		
1	Pelalawan	134	40	174	15.124	29.055	132.621	4.408
2	Indragiri Hilir	202	302	504	53.924	35.335	105.099	5.445
3	Kampar	243	42	285	48.101	113.928	164.300	3.835
4	Rokan Hilir	185	183	368	31.826	62.345	42.475	2.280
5	Siak	169	54	223	32.739	60.234	170.591	41.381
6	Bengkalis	609	157	766	14.945	29.890	57.421	12.641
7	Pekanbaru	601	213	814	137.779	251.415	547.603	22.916
8	Kuantan Singingi	141	63	204	7.221	5.314	44.620	3.304
9	Dumai	189	172	361	13.197	5.721	44.888	6.821
10	Indragiri Hulu	218	65	283	10.063	130.000	27.685	4.686
11	Rokan Hulu	100	94	194	15.098	33.509	39.514	3.865
	<b>Jumlah</b>	<b>2.791</b>	<b>1.385</b>	<b>4.176</b>	<b>380.017</b>	<b>756.746</b>	<b>1.376.817</b>	<b>111.582</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak ditemui, namun

dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

### **Permasalahan Koperasi di Pedesaan**

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan permasalahan pengembangan koperasi, antara lain: 1) lemahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya kualitas manajemen; 2) koperasi di pedesaan lebih banyak bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif; 3) masih ditemukan koperasi tidak melibatkan anggota dalam aktifitasnya (koperasi dikendalikan oleh pemilik modal); 4) kegiatan koperasi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga koperasi berjalan atas kehendak pengurus semata; 5) masih rendahnya partisipasi anggota karena anggota tidak merasakan manfaat sebagai anggota koperasi; 6) koperasi masih sebatas penghubung antara anggota dengan mitra kerja (khusus untuk koperasi petani perkebunan kelapa sawit); dan 7) adanya kegiatan koperasi yang memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan koperasi bagi kepentingan pribadi (sebagai usaha pribadi).

Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara lain: 1) budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik (pengawasan belum berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 2) pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 3) anggota koperasi di pedesaan pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 3) usaha yang dilakukan tidak fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset koperasi sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 4) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 5) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produk lainnya masih relatif sempit; 6) belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian.

### **Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM**

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kekuatan sinergi kolektif yang dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana mestinya.

Koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2006 berjumlah 4008 unit dan pada tahun 2007 meningkat menjadi berjumlah 4.176 unit. Dari jumlah koperasi tersebut yang dapat digolongkan aktif pada tahun 2006 sebanyak 2.779 unit, sementara pada tahun 2007 meningkat menjadi menjadi 2.791 unit koperasi. Kehidupan koperasi/ usaha kecil dan menengah diupayakan untuk terus dikembangkan oleh pemerintah pada masa mendatang melalui penguatan permodalan, pembenahan sistem manajemen, dan perluasan akses pasar.

Guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan di masa datang, maka pemerintah Daerah Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang Koperasi dan UKM (Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007), antara lain:

- Mengembangkan koperasi dan usaha kecil-menengah melalui pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta kegiatan-kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah;
- Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dan efisien dalam bentuk koperasi dan UKM melalui perluasan wawasan pengetahuan, organisasi, manajemen usaha, dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota masyarakat sehingga dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi pada koperasi dan UKM.

## **Potensi Pengembangan Koperasi**

### ***Kemitraan dalam Koperasi***

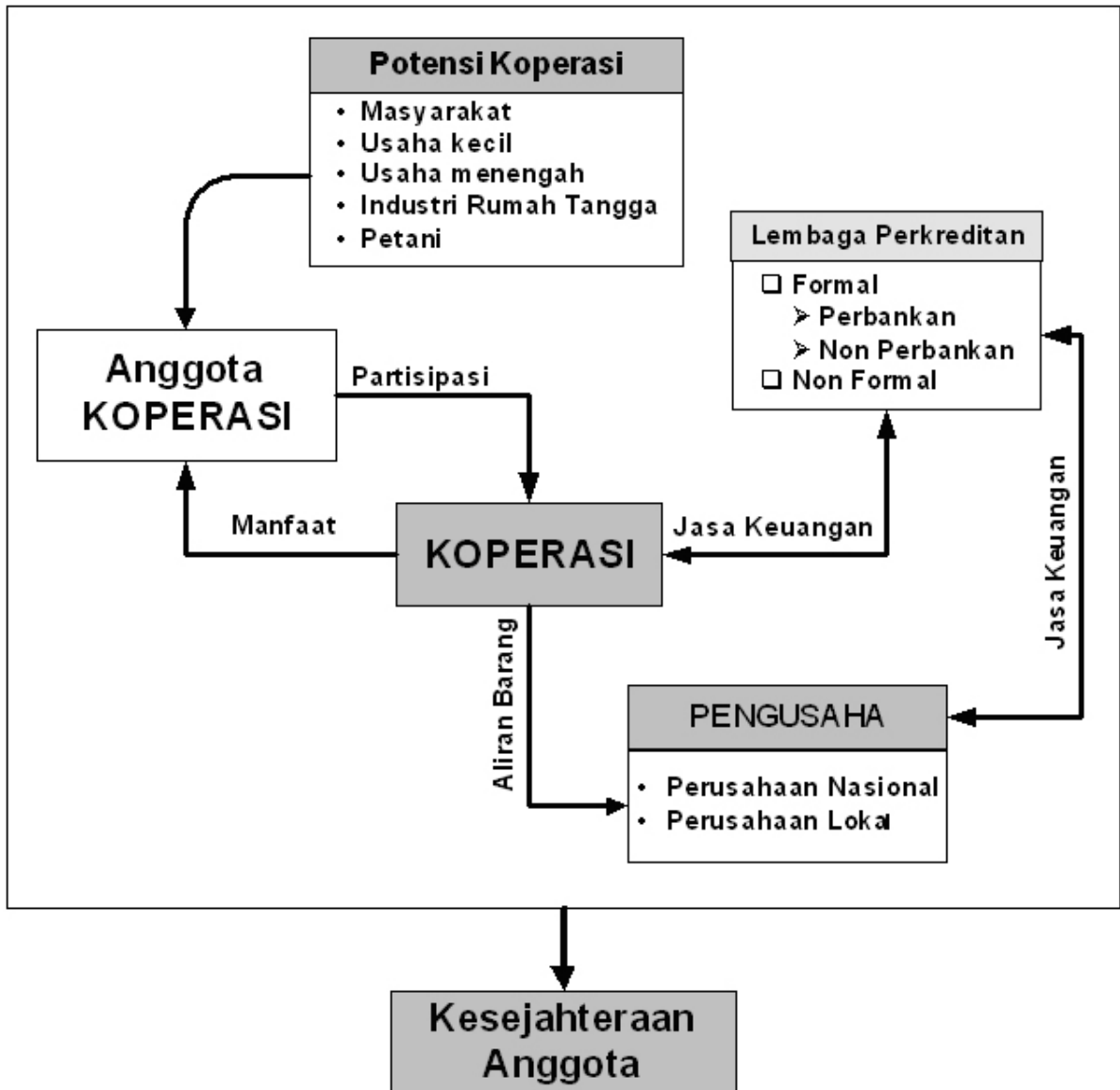
Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moral kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Harus diakui usaha koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, baik dari segi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, dan distribusi jasa/produk yang dihasilkan.

Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Konsep ini telah mulai ditawarkan sejak tahun 1980 dan dicanangkan melalui gerakan kemitraan usaha nasional (GKUN) pada tahun 1996. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan BUMS.

Konsep kemitraan merupakan bagian tanggungjawab social perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang.

Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani. Dengan dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus dikembangkan melalui koperasi dan menjadi anggota koperasi pada masing-masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan dan penyuluhan. Untuk lebih jelasnya bentuk mitra kerja koperasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Rancangan Mitra Kerja Koperasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Syahza. A, 2003 dimodifikasi)

### ***Partisipasi dan Manfaat Koperasi***

Tujuan utama mendirikan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat daerah sekitar pada umumnya. Namun tujuan tersebut sangatlah abstrak, oleh sebab itu, tujuan yang lebih kongkrit adalah promosi ekonomi anggota. Promosi ekonomi anggota dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan manfaat atau pelayanan secara optimal pada anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan koperasi secara bersama-sama, dan diberi tugas untuk menungjang kegiatan ekonomi para anggotanya. Setiap kelompok orang dapat merumuskan dan mewujudkan tujuan-tujuan secara bebas melalui kegiatan-kegiatan ekonomi secara bersama.

Dengan demikian keberhasilan koperasi tidak hanya cukup dengan partisipasi kontributif, tetapi lebih penting adalah partisipasi insentif dari koperasi bagi anggotanya. Peningkatan partisipasi dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) para

anggota. Hal ini merupakan ciri utama koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain (non koperasi).

Disamping pengaruh faktor di atas, keberhasilan usaha koperasi juga tampaknya berhubungan erat dengan manfaat yang dirasakan oleh para anggota koperasi. Manfaat yang dirasakan akan dinilai secara subjektif oleh anggota dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menumbuhkan loyalitas dan partisipasi anggota koperasi untuk melibatkan diri dalam setiap aktivitas koperasi.

Bila diamati bentuk partisipasi anggota dapat dibedakan menjadi tiga jenis (Roepke, 2000), yaitu:

1. Partisipasi anggota dalam mengkontribusi atau menggerakkan sumber-sumberdayanya.
2. Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi pelaksanaan, dan evaluasi).
3. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat.

Ketiga aspek partisipasi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Anggota yang tidak menikmati manfaat tidak akan mengkombinasikan sumber-sumberdaya yang dimilikinya. Manfaat koperasi tidak akan diberikan kepada anggota jika mereka tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada koperasinya.

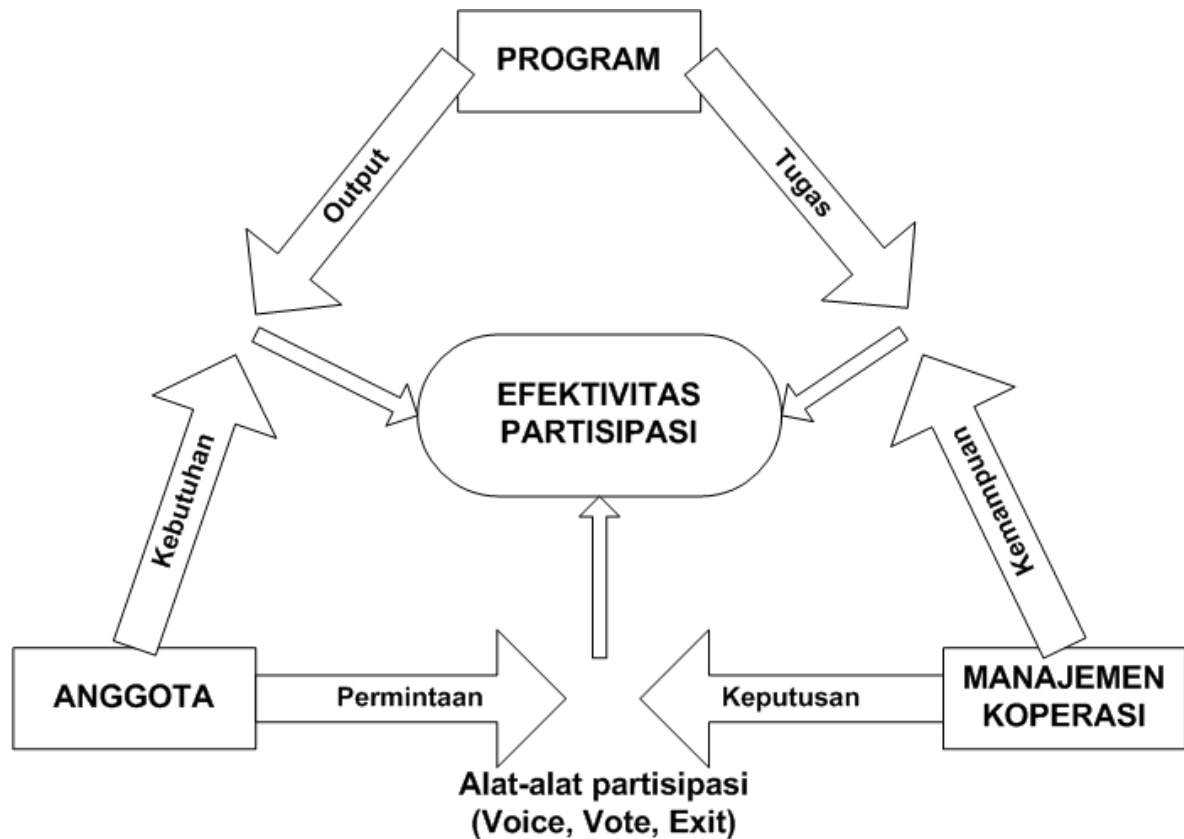
Untuk mendorong tingkat partisipasi anggota yang tinggi dalam suatu koperasi, perlu dilakukan: 1) mengadopsi suatu kegiatan fungsi tunggal koperasi; 2) keanggotaan yang homogen; dan 3) membatasi jumlah keanggotaan. Koperasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya agar partisipasi itu efektif. Hal itu diperlukan agar pertumbuhan koperasi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan partisipasi anggota menimbulkan rasa ikut memiliki. Bagi anggota yang tidak memperoleh manfaat atau tidak terpenuhi kebutuhannya, partisipasi tidak akan efektif dan biaya yang ditanggung bila mereka ikut berpartisipasi akan semakin besar karena adanya *oportunity cost*. Sebaliknya bila manfaat atau kebutuhan anggota terpenuhi, maka partisipasi kontribusi anggota akan efektif dan biaya yang ditimbulkan relatif lebih rendah.

Manajemen partisipatif memiliki kesesuaian dengan karakteriatik koperasi yang menekankan partisipasi anggota dalam pembiayaan, transaksi, dan penyampaian penda-pat. Perbedaannya adalah bahwa anggota koperasi berperan sebagai pemilik perusahaan koperasi, sehingga memiliki otoritas penuh dalam menentukan keputusan tanpa adanya hierakhi bawahan (anggota) dengan atasan (manajemen). Manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota sesuai dengan tingkat partisipasinya. Pengendalian manajemen oleh anggota secara teoritis mungkin terjadi sebagaimana pendapat Roepke (2000) dalam model kesesuaian partisipasi, seperti disajikan pada Gambar 3.

Bila variabel anggota, manajemen, dan program menemui kesesuaian maka akan tercapai keefektifan partisipasi anggota. Kesesuaian tersebut adalah: a) antara pelayanan yang dibutuhkan (*needs*) anggota dengan output pelayanan dari program, b) antara tugas-tugas (*task*) program dengan kemampuan (*ablity*) manajemen; dan c) antara apa-apa yang diminta (*demands*) anggota dengan keputusan (*decisions*) manajemen. Alat yang digunakan untuk mengendalikan mekanisme tercapainya kesesuaian ini adalah hak suara (*voice*), hak pilih (*vote*), dan hak keluar (*exit*).

Melalui model ini maka anggota akan berpartisipasi maksimal agar perusahaan koperasi bisa terwujud melalui pembiayaan (iuran anggota), memberikan pendapat, dan mengawasi jalannya perusahaan. Adanya kesesuaian tersebut berimplikasi pada pemilihan manajemen yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan anggota, melalui mekanisme hak suara (*one man one vote*). Jika manajemen dianggap

menyimpang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan usahatani anggota maka anggota akan rugi, sehingga mendorong ke luar dari keanggotaan koperasi. Mekanisme inilah yang perlu ditumbuhkembangkan oleh para promotor pada diri anggota koperasi yang mayoritas kondisi sosial ekonominya lemah, maupun pada manajemen koperasi agar difahami. Bantuan promotor yang andal harus didukung oleh anggota sehingga dapat menciptakan kekuatan anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi.



Sumber: Roepke, 2000

Gambar 3. Model Kesesuaian Partisipasi (Roepke, 2000)

Sasaran organisasi koperasi adalah mewujudkan peningkatan kepentingan anggota secara maksimal. Kepentingan anggota mendukung tercapainya keberhasilan koperasi sebagai badan usaha dan dapat memperoleh manfaat secara ekonomis dari koperasi. Keberhasilan usaha koperasi harus didasarkan pada landasar teori yang baik dan rasionalitas ekonomi.

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi anggota, demikian pula keberhasilan usaha serta manfaat bagi anggota koperasi di daerah pedesaan belumlah maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa fenomena yang dihadapi, antara lain:

1. Rendahnya partisipasi kontributif anggota karena manfaat yang diterima belum sesuai dengan keinginan para anggota.
2. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki koperasi sehingga ruang lingkup usaha yang dapat dijangkau masih terbatas.
3. Program kerja yang dijalankan pengelola sering kali berdasarkan atas pengalaman dan keinginan mengelola sendiri, sehingga kebutuhan dan keinginan anggota terabaikan.

4. Tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh antara anggota dan non anggota karena pelayanan yang diberikan kepada anggota sama dengan pelayanan yang diterima oleh bukan anggota.

### **Strategi Pengembangan Koperasi**

Pengembangan koperasi tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Sebagian besar koperasi yang ada baik di kota maupun di daerah pedesaan jenis usahanya lebih dominan berupa simpan pinjam dan usaha pertanian (perkebunan). Khusus untuk jenis industri di pedesaan, pada umumnya jenis usaha yang dilakukan bersifat sederhana dalam bentuk industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini akan dikembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Karakteristik yang melekat pada UKM (termasuk mikro) bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial, di sisi lain pada kekuatan tersebut implisit terkandung kekurangan atau kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM.

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda saat ini telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan koperasi dan industri kecil menengah (UKM) yang berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Syahza A, 2004).

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor industri kecil maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor industri kecil, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan koperasi yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya terutama di pedesaan.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung UKM tersebut disajikan pada Gambar 4.

### **Pengusaha**

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan UKM di daerah. Fungsinya sebagai pedagang adalah penyalur produk UKM yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, dalam negeri/lokal, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya

beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.



Gambar 4. Rancangan Strategi Pengembangan UKM Melalui Koperasi di Daerah

### ***Lembaga Perkreditan***

Lembaga perkreditan pada kegiatan UKM cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UKM ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di daerah/pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha apakah dalam bentuk agribisnis dan agroindustri atau usaha lainnya. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (UKM) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku mitra kerja UKM). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

### ***Instansi terkait***

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan UKM diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku bisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan

pengusaha kecil. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

### ***Koperasi sebagai badan usaha***

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk UKM. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin kepada anggota (industri kecil). Dari sisi lain koperasi juga sebagai pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh industri kecil sebagai anggotanya.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan.
2. Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan BUMS.
3. Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani.

### **Saran**

1. Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan.
2. Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha.
3. Untuk mendorong tingkat partisipasi anggota yang tinggi dalam suatu koperasi, perlu dilakukan: 1) mengadopsi suatu kegiatan fungsi tunggal koperasi; 2) keanggotaan yang homogen; dan 3) membatasi jumlah keanggotaan. Koperasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya agar partisipasi itu efektif. Hal itu diperlukan agar pertumbuhan koperasi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan partisipasi anggota menimbulkan rasa ikut memiliki.

4. Manajemen koperasi harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar perusahaan koperasi dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam memenuhi tujuan promosi anggota.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Basri. Y.Z., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Basri M, 2007., *Desa dan Kemiskinannya*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/30/Jabar/11719.htm>, diakses 31 Juli 2007.
- Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007, *Pengkajian Peningkatan Daya Saing KUKM yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Lokal di Propinsi Riau*, Dinas Koperasi, Pekanbaru.
- Roepke, Jochen., 2000. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Philipps University Marburg Germany, Alih bahasa oleh Sri Djatmika S. Arifin, Salemba Empat, Jakarta.
- Syahza. A., 2003. Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, TH. VIII/01/2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syahza. A., 2004. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 6 No 3, November 2004, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syahza. A., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Syahza. A., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Syahza. A., 2008. *Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau*, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Wijaya S., 2002. Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Usahawan Indonesia*, NO. 07/TH. XXXI Juli 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta,